



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 22 April 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hani Purwaka, Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan, No. RNA - 7704



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	4.3.1.1.1.a	23.462.357.600,53	61.752.769.102,86
Kas di Bendahara Penerimaan	4.3.1.1.1.b	13.231.924,00	24.959.467,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.3.1.1.1.c		76.450.634,00
Kas di BLUD	4.3.1.1.1.d	45.734.763.013,06	41.259.937.445,85
Kas di Bendahara BOS	4.3.1.1.1.e	1.112.967.254,00	11.917.590.919,58
Kas Lainnya	4.3.1.1.1.f	9.478.078.209,00	9.506.244.904,29
Piutang Pajak Daerah	4.3.1.1.2.a	1.027.224.000,00	
Piutang Retribusi Daerah	4.3.1.1.2.b	2.876.334.157,00	2.174.347.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.3.1.1.2.c	22.606.971.857,89	9.309.279.887,25
Piutang Lainnya	4.3.1.1.2.d	1.688.470.646,07	35.211.470.344,52
Penyisihan Piutang	4.3.1.1.3	(4.441.184.050,08)	(3.803.231.913,37)
Beban Dibayar Dimuka	4.3.1.1.4	3.718.075.722,06	2.600.265.276,57
Persediaan	4.3.1.1.5	99.574.950.539,99	93.859.642.792,57
JUMLAH ASET LANCAR		206.852.240.873,52	263.889.725.861,12
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.3.1.2	7.442.535.027.852,15	7.267.323.138.467,60
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		7.442.535.027.852,15	7.267.323.138.467,60
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		7.442.535.027.852,15	7.267.323.138.467,60
ASET TETAP			
Tanah	4.3.1.3.1	11.329.490.821.739,56	10.573.586.020.615,60
Peralatan dan Mesin	4.3.1.3.2	2.768.373.058.986,04	2.460.507.732.869,82
Gedung dan Bangunan	4.3.1.3.3	4.462.812.938.458,99	4.215.821.795.215,60
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.3.1.3.4	12.991.502.065.603,37	12.175.895.778.611,60
Aset Tetap Lainnya	4.3.1.3.5	671.272.671.147,30	793.406.131.269,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.3.1.3.6	323.103.432.987,30	100.163.923.630,28
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.3.1.3.7	-9.983.381.603.426,95	-8.947.561.262.175,54
JUMLAH ASET TETAP		22.563.173.385.495,61	21.371.820.120.036,50
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	4.3.1.4.a	17.750.000,00	17.750.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.3.1.4.b	1.668.304.573.000,00	1.669.475.073.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.3.1.4.c	130.386.962.349,00	109.283.355.264,00
Aset Lain-lain	4.3.1.4.d	2.401.307.817.956,64	2.526.741.647.765,70
Akumulasi Amortisasi	4.3.1.4.e	(96.327.071.916,00)	(89.639.684.474)
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	4.3.1.4.f	(1.008.169.863.580,00)	(1.123.719.279.306,87)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.095.520.167.809,64	3.092.158.862.248,83
JUMLAH ASET		33.308.080.822.030,92	31.995.191.846.614,10
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.3.2.1.1	59.890.739.802,00	2.917.561.164,02
Utang Bunga	4.3.2.1.2	184.805.354,47	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.3.2.1.3	215.272.103.903,49	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.3.2.1.4	1.203.651.638,07	1.185.425.170,83
Utang Belanja	4.3.2.1.5	501.637.475.328,69	226.526.680.931,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.3.2.1.6	267.342.933.050,26	496.327.918.994,52
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.045.531.709.076,97	726.957.586.260,92
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	4.3.2.2	404.037.583.195,22	125.743.510.336,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		404.037.583.195,22	125.743.510.336,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.449.569.292.272,20	852.701.096.596,92
EKUITAS			
EKUITAS	4.3.3	31.858.511.529.758,72	31.142.490.750.017,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.308.080.822.030,90	31.995.191.846.614,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU